

ANALISA EKONOMI DAN FISKAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Semester 1 2013

1. Perkembangan Ekonomi

Dalam 3 tahun terakhir ini perekonomian Kalimantan Barat berkembang lebih lambat dibandingkan perekonomian nasional. Data publikasi BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2012 realisasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat hanya sebesar 5,39% jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional yang besarnya mencapai 6,2%. Hal yang sama terjadi pada Triwulan I 2013, dimana ekonomi Kalimantan Barat hanya tumbuh sebesar 5,79% juga jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,02%.

Terdapat dua sektor lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan terbesar menurut harga berlaku pada triwulan I-2013 yaitu sektor pertanian sebesar 1,81% dan sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar 1,03%. Peningkatan pertumbuhan di sektor pertanian yang cukup tinggi pada triwulan I-2013 merupakan refleksi dari puncak musim panen tanaman padi. Secara rinci kenaikan sektor pertanian didukung oleh pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan sebesar 39,17%. Subsektor lainnya mengalami penurunan masing-masing sebesar minus 4,19% untuk subsektor peternakan, minus 2,48% untuk subsektor perikanan, minus 2,45% untuk subsektor perkebunan, dan minus 1,84% untuk subsektor kehutanan.

Pertumbuhan sektor pertanian yang relatif besar tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong tetap tingginya peranan sektor pertanian dalam perekonomian Kalimantan Barat. Dimana hingga Triwulan I 2013 struktur ekonomi Kalimantan Barat masih didominasi oleh sektor pertanian dengan besaran 26,50%, diikuti sektor perdagangan-hotel-restoran 22,38% dan sektor industri pengolahan 16,53%. Dari sisi penggunaan, sumber utama pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga (52,60%), konsumsi pemerintah (13,34%), investasi (26,78%), ekspor (24,72%) dan impor (21,83%).

Terdapat paling tidak dua isu yang perlu diperhatikan terkait dengan perkembangan perekonomian Kalimantan Barat, yaitu:

- a) Tingginya angka inflasi Kalimantan Barat dibandingkan dengan inflasi nasional. Tahun 2012 inflasi Kalimantan Barat sebesar 6,19% jauh lebih tinggi dari inflasi nasional yang hanya 4,3%. Laju inflasi tahun 2013 yang sudah berjalan enam bulan sebesar 4,03 persen. Sedangkan inflasi periode yang sama pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 masing-masing hanya sebesar 0,68 persen, 0,21 persen, 0,80 persen dan 1,13 persen. Besarnya laju inflasi *year on year* untuk bulan Juni 2013 terhadap Juni 2012 sebesar 6,96 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan I 2013 yang mencapai 6,12%. Tingginya angka inflasi ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi infrastruktur terutama pelabuhan dan bandara yang tidak layak, listrik yang kekurangan pasokan, serta kondisi jalan dan jembatan yang menghubungkan kota Pontianak sebagai ibukota provinsi dengan kabupaten/kota lain yang mengalami kerusakan parah di berbagai lokasi.
- b) Adanya kecenderungan peningkatan gini ratio, dimana Gini Ratio tahun 2011 sebesar 0,37 meningkat menjadi 0,38 pada tahun 2012, dan pada semester I 2013 meningkat tajam menjadi 0,41(angka sementara). Semakin besar gini ratio berarti semakin besar ketimpangan pendapatan pada provinsi Kalimantan Barat. Jumlah penduduk yang memiliki pendapatan yang tinggi di provinsi Kalimantan Barat semakin kecil, sedangkan penduduk yang memiliki pendapatan rendah semakin banyak. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menstimulus terjadinya konflik di masyarakat.

2. Perkembangan Fiskal

I – account anggaran pusat untuk Provinsi Kalimantan Barat semester I tahun 2013 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp 2.083.516.664.278 atau 48.72% dari target penerimaan perubahan (APBN-P) sebesar Rp 4.276.913.641.721. Sementara dari sisi belanja baru terealisasi sebesar Rp 2.207.885.367.244 dari pagu anggaran sebesar Rp 8.006.622.864.185 atau sebesar 27.58%. Terdapat penurunan dibandingkan dengan penyerapan pada Semester I tahun 2012 yang mencapai 33.71%. Rendahnya realisasi penyerapan pada tahun 2013 diakibatkan oleh adanya APBN-P dimana terdapat penambahan pagu terutama untuk belanja modal.

Sementara I – account anggaran daerah menunjukkan bahwa dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat untuk Tahun 2013 pendapatan secara agregat di anggarakan sebesar Rp 15.055,50 miliar naik sebesar 53,24% dari pendapatan Tahun 2012 yang hanya sebesar Rp 9.824,93 miliar. Sebagian besar pendapatan tersebut masih berasal dari dana perimbangan, yaitu sebesar Rp 11.305,05 miliar dan sisanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2.119,89 miliar dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp 1.630,57 miliar.

Dari sisi belanja, untuk Tahun 2013 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran belanja daerah sebesar Rp15.709,02 miliar, naik sebesar 51,38% dari belanja daerah tahun 2012 yang besarnya hanya Rp10.377,05 miliar. Dengan demikian untuk tahun 2013 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 653,52 miliar atau naik sebesar 18,37% dari defisit anggaran Tahun 2012. Defisit anggaran Tahun 2013 dibiayai dari Pembiayaan Netto sebesar Rp 653,52 miliar, dimana Pembiayaan Netto ini berasal dari Penerimaan Pembiayaan yaitu SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp 932,96 miliar dikurangi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 279,44 miliar (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah).

Terkait dengan pendapatan dan belanja daerah di Kalimantan Barat, maka terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a) Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana PAD di sebagian besar Kabupaten/kota kurang dari 5% dari total pendapatan daerahnya. Hanya ada 2 daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang tingkat kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah-nya diatas rata-rata nasional yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (41,48%) dan Kota Pontianak (22,46%). Kondisi ini menunjukkan besarnya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
- b) Meskipun dalam APBD komponen belanja lebih besar dari pendapatan sehingga APBD defisit, namun dalam realisasi pada umumnya terjadi surplus di hampir semua pemerintah kabupaten/kota. Besaran surplus ini cenderung semakin besar. Surplus anggaran yang disebabkan oleh rendahnya penyerapan sebenarnya sangat merugikan karena rakyat gagal menikmati tambahan pelayanan.
- c) Ruang Fiskal daerah yang relatif tinggi dibanding pemerintah provinsi di Jawa menunjukkan masih adanya keleluasaan daerah untuk mengalokasikan anggaran pada kegiatan yang betul-betul sangat dibutuhkan oleh daerah. Namun dalam kenyataannya perkembangan kemajuan pelayanan publik tetap saja berjalan sangat lambat, antara lain tampak dari tetap rendahnya peringkat IPM Kalimantan Barat (peringkat 28 dari 33 provinsi).
- d) Tingginya proporsi belanja pegawai yaitu sebesar 38.89% pada tahun 2013 yang menyebabkan terbatasnya kemampuan pemerintah daerah menyediakan pelayanan publik.
- e) Rendahnya belanja modal yang hanya sebesar 26% sehingga mengurangi kemampuan pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- f) Belanja sebesar Rp15.709,02 miliar tersebut terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp7.428,43 miliar dan Belanja Langsung sebesar Rp8.280,60 miliar. Dengan demikian proporsi belanja langsung sudah melampaui 50% tapi masih jauh dari kondisi ideal sebesar 60-65%.

3. Rekomendasi

Berdasarkan pada perkembangan ekonomi dan fiskal tersebut di atas, maka ada beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan, yaitu antara lain:

- 1) Koordinasi yang intensif dalam membuat perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya antara provinsi dan kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan, menghindari tumpang tindih dan mengedepankan skala prioritas.
- 2) Memperbaiki akses dari Kalimantan Barat ke provinsi lain di Kalimantan melalui jalan trans Kalimantan disertai dengan moda transportasi publik yang memadai.
- 3) Kalimantan abarat harus melengkapi infrastruktur baik kelistrikan maupun pelabuhan samudra sebagai syarat masuknya pemodal asing maupun pemodal dalam negeri.
- 4) Terkait dengan perbaikan pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah, ke depannya diharapkan agar pemerintah daerah membangun sebuah sistem dan meningkatkan ketersediaan tenaga aparatur yang memahami akuntansi keuangan. Di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Barat saat ini masih terbatasnya sumberdaya aparatur yang memiliki keahlian dalam akuntansi keuangan. Selain dari itu, atas dasar dari hasil temuan-temuan atau opini yang diberikan oleh BPK tersebut, diharapkan adanya keseriusan pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya, memperbaiki berbagai kelemahan dan

penyimpangan tersebut, sehingga kedepannya bisa menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance.

- 5) Terkait yang masih tingginya penetapan APBD kabupaten/kota yang tidak tepat waktu, agar sebaiknya pemerintah daerah membangun sebuah sistem pembahasan APBD yang sistematis tidak berlarut-larut pada ranah politik.
- 6) Ruang Fiskal Kalimantan Barat yang relatif tinggi sebaiknya diarahkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dengan fokus peningkatan keterhubungan (*connectivity*) antar kab/kota serta untuk membantu percepatan pembangunan di kabupaten tertinggal.
- 7) Perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor penyebab kecenderungan tingginya besaran SILPA daerah.
- 8) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pemda dengan prioritas pada pengelola keuangan daerah dan perencana pembangunan daerah melalui pendidikan dan latihan serta menataulang penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya.
- 9) Perlu dihitung jumlah PNSD ideal di Provinsi dan di tiap Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat, hasilnya kemudian digunakan sebagai dasar dalam alokasi belanja pegawai maksimal. Hal ini perlu dilakukan untuk Pengendalian jumlah PNS di daerah, Penyesuaian struktur belanja, Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, serta efisiensi dan efektivitas belanja Pemerintah Daerah.
- 10) Mendorong Peningkatan daya saing daerah melalui percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya peningkatan pasokan energi listrik dan peningkatan kualitas dan kuantitas jalan.
- 11) Untuk mempercepat proses pembahasan anggaran sekaligus mengurangi kemungkinan kesalahan alokasi anggaran akibat 'permupakatan jahat', maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan

revisi terhadap UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya untuk mencari format yang paling tepat terkait sejauh mana peran DPR/DPRD dalam pembahasan anggaran.

- 12) Earmarking belanja APBN sebaiknya dikurangi tetapi earmarking belanja APBD terutama di daerah yang sangat tertinggal masih diperlukan untuk peningkatan kualitas belanja. Untuk itu diperlukan desain kebijakan berdasarkan klaster.